

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Nawacita merupakan program agenda prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Jokowi – Jk). Berdasarkan program yang di rencanakan terdapat sembilan agenda yang diprioritaskan dengan tujuan menuju perubahan untuk Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta bisa mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan program tersebut untuk perubahan Indonesia ialah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
3. Memperteguh ke-bhinekaan dengan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Sembilan Program Nawacita telah di masukan menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, berdasarkan dari sembilan prioritas program tersebut penulis telah mengambil tiga point untuk menjelaskan secara rinci agar pembahasan tidak meluas, beberapa point diantaranya nomer dua, tujuh dan sembilan. Sedangkan RPJMN sembilan program nawacita tersebut telah menjadi penuntun kebijakan pemerintahan lima tahun kedepan, sehingga menjadi pondasi pembangunan yang kuat periode kedua yang akan datang (Kominfo, 2015).

Hubungan Negara Indonesia dengan Jepang sudah terjalin cukup lama pasca dibuka hubungan diplomatik dan perjanjian perdamaian antara Jepang dan Indonesia sekitar pada tahun 1958. Kemudian merumuskan untuk kedepannya agar terkait hubungan bilateral terhadap kedua Negara Indonesia dengan Jepang di realisasikan kerjasamanya yang lebih nyata, di tingkatkan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang pada saat pertemuan APEC pada tahun 1994. Pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menjamu mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda di istana Bogor pada tahun 2013, mengatakan bahwa hubungan Indonesia - Jepang merupakan hubungan yang tergolong kuat dan harmonis. terlepas dari itu juga di katakan terkait kerjasama dalam bidang geoekonomi, geopolitik dan perdamaian serta kesejahteraan kawasan. Mengingat banyak peluang yang bisa di ambil oleh kedua negara secara bersama, kepentingan ini merupakan peluang kerjasama yang besar bisa dimulai pada bidang ekonomi maupun pada bidang-bidang lainnya sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan kedua bangsa yang telah disepakati.

Setiap pemimpin yang memimpin Indonesia mempunyai caranya masing-masing baik strategi yang dimiliki tujuan yang akan dituju dan gaya kepemimpinannya. Baik program-program yang di laksanakan Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono tidaklah sama serta pada saat menjalankan

perdiplomasinya. Gaya kepemimpinan Jokowi lebih cenderung menggunakan tiga strategi diplomasi yang sering kita kenal G to G , B to B dan P to P dalam proses penyelesaian sengketa ketika antara hubungan dengan negara lain juga terjadi pada saat melaksanakan program nawacita sebagai dasar tujuan arah kebijakan Presiden Jokowi sebagai dasar melakukan diplomasi, akan tetapi dalam kebijakan dan program yang akan di gunakan tak lupa juga untuk mengamati terkait kepentingan tergantung juga pada Negara yang akan di tuju. Seperti halnya kepentingan yang akan di tuju terutama dalam bidang investasi, perdagangan, ekonomi , maritim , dan bidang militer dalam upaya untuk melindungi perbatasan ini semua dilaksanakan semata-mata hanya untuk kemajuan, perkembangan serta menjaga keutuhan Negara Indonesia (Kartika, 2018).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengapresiasi terhadap delegasi-delegasi pengusaha Jepang yang di bawah pimpinan komando Fukuda karena telah bersedia untuk berdialog langsung dengan para mitra yang kami miliki, para pemimpin usaha Jepang yang selama ini telah berkerja sama dengan Indonesia. Sementara itu di Tokyo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan kalangan pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan - Indonesia *Association* (JAPINDA) pimpinan Yasuo Fukuda. Sejumlah para pengusaha yang telah hadir antara lain adalah para CEO perusahaan-perusahaan terkemuka Jepang seperti Mitsubishi, Marubeni, Toshiba, Sumitomo dan Toyota. Pada kunjungannya yang kedua di Jepang saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu menteri Jepang Shinzo Abe, membahas perkembangan hubungan antara Indonesia - Jepang yang sudah berjalan 55 tahun. Harapannya untuk kedepan kerjasama ini lebih ditingkatkan terutama di bidang investasi yang meliputi disektor ekonomi, pembangunan infrastruktur dan kerja sama pada sektor-sektor yang lain. Karena Negara Jepang merupakan Negara yang maju akan kepemilikan kemajuan teknologi yang canggih dan salah satu Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. hal ini bisa

menjadi kesempatan agar Negara Indonesia dapat memanfaatkan Peluang dari kemajuan teknologi ini untuk membuka pembangunan Selalu terjalin komunikasi yang baik antara kedua bangsa ini tujuannya ketika ada peluang-peluang kerjasama dan juga ketika ada isu-isu terbaru antara kedua bangsa ini bisa dicarikan bersama-sama solusinya yang tepat untuk Indonesia maupun untuk Jepang (Kominfo, 2013).

Hubungan antara Indonesia – Jepang sampai pada saat ini telah menghadirkan berbagai dampak, baik berdampak positif maupun negatif yang terutama adalah dampak untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada saat pertemuan dengan perdana menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan pada saat acara KTT Asean Ke-35 Tahun 2019 di Bangkok, Thailand. Negara Jepang akan mendukung sepenuhnya terkait prioritas program pembangunan dalam masa pemerintahan Jokowi periode kedua. hal tersebut telah di buktikan dengan adanya pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia pada saat ini. kemudian untuk kedepanya Negara Jepang dapat memberikan fleksibilitas dalam perundingan peninjauan menyeluruh Indonesia – Jepang *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (RCEP) agar perundingan segera di selesaikan. Pada saat akhir november saat pertemuan Dua Mentri luar negri di Nagoya seiring dengan pertemuan G20, Retno L.P. Marsud dan Toshimitsu Motegi menegaskan bahwasanya selain membantu terkait pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia Jepang akan terus membantu Indonesia terkait pengembangan pulau-pulau terpececil di Indonesia, serta meningkatkan kerjasama di bidang maritim dan menindaklanjuti pertemuan yang terbaru terkait puncak bilateral.

Berdasarkan realisasi dari poin nomer dua program nawacita telah adanya undang - undang yang mendukung yaitu undang - undang nomer 6 tahun 2014 tentang pemberian dana desa dengan anggaran yang mencapai Rp 60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia. kementerian keuangan

mencatat dana desa juga telah mengurangi ketimpangan di desa dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017. Sedangkan point yang ke-tujuh realisasi dari program nawacita mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik karena sejalan dengan perencanaan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan nasioanl hal tersebut telah dilandasi dengan amanat undang-undang nomer 3 tahun 2014 tentang perindustrian, kementerian perindustrian mencatat investasi Jepang Rp 59,8 triliun pada tahun 2016. Sedangkan dalam poin ke sembilan dari program nawacita agar meningkatkan produktivitas rakyat dan daya asing di pasar internasional agar indonesai bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya realisasinya dari program ini kementerian PUPR telah melakukan salah satunya pembangunan infrastruktur. Salah satunya pembangunan proyek MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta - Surabaya dan pelabuhan patimban. Yang sangat dapat di rasakan dampaknya baik di rasakan secara langsung kepada masyarakat Indonesia. misalnya dapat memudahkan Perjalanan Kereta Api dari Jakarta - Surabaya begitupun sebaliknya bagi penggunanya akan tetapi bukan hanya dampak positif yang terjadi bagi Indonesia tetapi juga dampak negatifnya juga seperti Indonesia harus memenuhi kebutuhan bahan baku Negara Jepang (Ihsanuddin, 2019).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraiakan di atas, dapat di munculkan rumusan masalah sebagai berikut: **“Faktor-faktor apa yang mendorong Program Nawacita Dalam Hubungan Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang (2014-2019)?”**

C. Landasan teori

Landasan teori pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis untuk menentukan tujuan dan arah penulis, serta untuk memilih konsep maupun teori untuk menyusun hipotesa dengan melihat kembali latar belakang masalah sementara dan mencari pokok permasalahan yang ada, dengan hal tersebut maka bisa membantu penulis untuk mempermudah menjawab rumusan masalah penulis menggunakan *kebijakan luar negeri* dan *teori investasi*.

1) Kebijakan Luar Negri

Studi hubungan internasional sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antar Negara, sedangkan didalamnya sendiri kita mempelajari kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan juga bagian dari politik luar negeri yang merupakan sebagai strategi atau tindakan yang telah di rencanakan dan di rumuskan oleh pembuat keputusan dari sebuah Negara yang di tujukan untuk Negara lainya atau kepentingan nasional sebuah Negara dalam membuat kebijakan luar negrinya yang di gunakan sebagai representasi dari kasa politik nasional suatu Negara. dalam mempelajari politu luar negeri landasan dasar yang harus kita ketahui pertamata yaitu politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu Negara yang di tujukan ke Negara lain untuk mencapai suatu kepentingan nasional ataupun kepentingan tertentu, secara general maksudnya politik luar negeri merupakan seperangkat nilai, sikap, sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam dunia internasional. Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri yaitu dengan cara memisahkan ke dalam dua komponen yang petama ke komponen politik dan selanjutnya ke komponen luar negeri. Hal ini

lebih memudahkan kita untuk mengetahui bahwasanya politik merupakan seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Menurut William D. Coplin untuk memahami mengapa suatu Negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka kita harus memahami mengapa atau apa yang melatar belakangi para pemimpin membuat sebuah keputusan, Setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat dari tiga kategori dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam pengambil keputusan. Pertama, politik dalam negeri dalam kebijakan Negara-nagara pengambil keputusan. Yang kedua, kemampuan ekonomi dan militer Negara setiap Negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menompang politik luar negrinya situasi ekonomi dan militer domestic. Yang ketiga, konteks internasional, yaitu posisi tertentu dimana Negara itu menemukan jati dirinya khususnya mengenai hubungan dengan negara lain dalam suatu sistem yaitu geografis, ekonomi dan politis konteks internasional (Coplin, 1992).

Dalam misinya Jokowi menegaskan bahwasanya melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan pertahanan dilandasi kepentingan nasional, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritin. Point tersebut yang menjelaskan bahwasanya Presiden Jokowi menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional dan mewujudkan agenda pembangunan. Upaya yang dilakukan terkait perkembangan domestik maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya pemerintah saat ini memprioritaskan kebijakan luar negeri untuk agenda

nasional seperti diplomasi ekonomi untuk meningkatkan investasi dan praktik demokrasi ekonomi sebagai basis politik luar negeri. Untuk menarik investasi asing, membuka pasar luar negeri dan mengundang lebih banyak investor asing ke tanah air maka dengan partisipasi dalam forum - forum *APEC*, *KTT ASEAN* dan *KTT G-20*, harapannya hal tersebut bisa terlaksanakan sesuai program yang di wacanakan. mengingat dalam waktu 15 tahun terakhir tepatnya pada tahun 2017-an Jepang kembali menjadi investor dengan menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama investasinya. Setelah di terbitkan perpres nomor 39/2014 tentang daftar usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanam modal, karena selama awal tahun 2017 sampai dengan september 2017, Jepang tercatat sebagai penanam modal asing (PMA) yang menanamkan investasi terbesar kedua di Indonesia.

2) Teori investasi

Secara umum investasi merupakan bentuk usaha berupa penanaman modal yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, investasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak secara langsung. Dalam investasi langsung terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi arus investasi. pertama, keuntungan khusus yang dapat diambil oleh investor asing yang menjadi pertimbangan ataupun motivator investor asing berinvestasi. Selanjutnya tempat sekaligus pilihan bentuk penanaman modalnya secara langsung. maka keuntungan tiga faktor tersebut adalah faktor kepemilikan, faktor lokasi dan faktor internalisasi.

Menurut teori Alan M. Rugman bahwasanya dalam teori investasi asing terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel

lingkungan dan variabel internalisasi. Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik atau faktor spesifikasi lokasi. Dalam pengaplikasiannya dengan teori ini, penulis akan menjelaskan dengan investasi asing yang terdiri atas variabel lingkungan dan variabel internalisasi.

a. Variabel lingkungan

Variabel lingkungan merupakan sebuah keunggulan yang spesifik suatu negara ataupun faktor spesifikasi lokasi. Dalam variabel lingkungan skripsi ini menjelaskan yang menarik Jepang salah satunya faktor sumber daya alam (SDA), seperti hasil bumi maupun iklim dan letak geografis, faktor sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini berkaitan dengan tenaga kerja yang siap bekerja di perusahaan. Kemudian faktor stabilitas politik dan perekonomian karena berdampak terhadap investor yang telah menanamkan modalnya dalam menjamin kepastian berusaha. Pembangunan infrastruktur salah satu menjadi faktor kerjasama negara Jepang, dengan memanfaatkan keunggulan teknologi dalam mendukung kersama antara Indonesia dengan Jepang. kementerian PUPR dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) berkerjasama dalam bidang infrastruktur dengan total senilai USD 1,1 miliar. Meskipun tidak hanya dalam bidang Investasi, perdagangan, kerjasama ekonomi dan pada bidang-bidang yang lain . (Novita, 2018).

b. Variabel internalisasi

Faktor pemerintah yang terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan kepada investor asing asal yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam berinvestasi di suatu negara. Dengan adanya teori ini membantu menjelaskan bahwasanya Jepang telah mengetahui adanya keuntungan yang didapatkan kedua negara, kebijakan dan langkah-

langkah dalam menerapkan regulasi dan system birokrasi yang dapat membuat investor tertarik dan menjamin usaha yang kondusif dengan menggandeng Japan External Trade Organization (JETRO) upaya yang dilakukan menteri perindustrian Airlangga hartarto telah membuahkan hasil selain sejalan dengan peraturan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan nasional, dan dilandasi oleh amanat undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Tercatat investasi Jepang mencapai USD 4,498 miliar atau Rp 59,8 triliun pada tahun 2016 (Kemenperin, 2017).

D. Hipotesa

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah serta teori yang digunakan maka disimpulkan faktor-faktor yang mendorong program nawacita dalam hubungan Indonesia dan Jepang adalah sebagai berikut :

Pertama, keselarasan Nawacita terhadap arah kebijakan luar negeri Presiden Jokowi dalam bidang investasi, perdagangan, ekonomi, maritim dan bidang militer.

Kedua, Jepang melihat adanya peluang keuntungan jangka panjang di Indonesia ditambah regulasi dan sistem birokrasi yang menarik investor.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan kebijakan terhadap hubungan kedua Negara Indonesia dengan Jepang.
2. Menganalisis dampak mengapa Presiden Jokowi-jk menerapkan program nawacita tersebut.
3. Memperluas kajian ilmu hubungan internasional dan mata kuliah politik pemerintahan Jepang, pengantar diplomasi.

F. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan, penulis akan membatasi jangkauan penelitian pada tahun 2014-2019. Hal ini dikarenakan agar penulis lebih fokus terhadap dampak - dampak program kebijakan Presiden Jokowi pada periode 2014-2019.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada teknik *library research* atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan memahami fakta. Yaitu diawali dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek analisa. Kemudian fakta-fakta tersebut dirubah menjadi generalisasi empiris. Dari generalisasi empiris inilah dilakukan proses perumusan konsep, perumusan dan perangkaian preposisi, dan kemudian diubah menjadi induksi teori.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima Bab yang terdiri dari :

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari penulisan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan..

BAB II, bagian ini membahas tentang subjek penelitian yaitu program nawacita Presiden Jokowi terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang khususnya terhadap perkembangan kerjasama antara kedua Negara.

BAB III, bagian ini membahas tentang objek penelitian hubungan negara Indonesia dengan Jepang. Dalam

BAB IV, dalam bab ini penulis akan membahas hipotesa yang terdapat di bab 1 dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan teori investasi

BAB V, merupakan kesimpulan yang berisi rangkuman, pembahasan mengenai keseluruhan penelitian.